

TESIS

**ANALISIS KOMPARATIF PENYERAPAN TENAGA KERJA
PADA KAWASAN BARAT INDONESIA (KBI) DAN
KAWASAN TIMUR INDONESIA (KTI)**

***THE COMPARATIVE ANALYSIS OF MAN POWER
ABSORPTION IN WESTERN PART OF INDONESIA (WPI)
AND EASTERN PART OF INDONESIA (EPI)***

**AYU LATIFAH ALFISYHRIN
A052191002**



kepada:

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SUMBER DAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**ANALISIS KOMPARATIF PENYERAPAN TENAGA KERJA
PADA KAWASAN BARAT INDONESIA (KBI) DAN
KAWASAN TIMUR INDONESIA (KTI)**

***THE COMPARATIVE ANALYSIS OF MAN POWER
ABSORPTION IN WESTERN PART OF INDONESIA (WPI)
AND EASTERN PART OF INDONESIA (EPI)***

Disusun dan diajukan oleh

**AYU LATIFAH ALFISYHRIN
A052191002**



kepada:

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SUMBER DAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

ANALISIS KOMPARATIF PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA KAWASAN BARAT INDONESIA (KBI) DAN KAWASAN TIMUR INDONESIA (KTI)

Disusun dan diajukan oleh

AYU LATIFAH ALFISYHRIN
A052191002

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian
Studi Program Magister, Program Studi Ekonomi Sumberdaya, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Hasanuddin


pada tanggal **10 Februari 2021**


dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Paulus Uppun, S.E., M.A.
NIP. 19561231 198503 1 015


Dr. H. Madris, S.E., DPS., M.Si.
NIP. 19601231 198811 1 002

Ketua Program Studi
Ekonomi Sumberdaya,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin,


Dr. Hj. Fatmawati, SE., M.Si.
NIP. 19640106 198803 2 001


Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si.
NIP. 19640205 198810 1 001



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Latifah Alfisyahrin

NIM : A052191002

Perogram Studi : Ekonomi Sumberdaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

**"Analisis Komparatif Penyerapan Tenaga Kerja pada Kawasan Barat Indonesia (KBI)
dan Kawasan Timur Indonesia (KTI)"**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 22 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Februari 2021

Yang membuat pernyataan,



Ayu Latifah Alfisyahrin

PRAKATA

Alhamdullillahirrabbi'l'alamiin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta salam dan salawat senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas sunnah dan petunjuknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul **“Analisis Komparatif Penyerapan Tenaga Kerja pada Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI)”**.

Gagasan yang melatari tajuk permasalahan ini timbul dari paradoks antara adanya disparitas penyerapan tenaga kerja pada Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Penulis bermaksud menyumbangkan konsep untuk menyikapi permasalahan disparitas penyerapan tenaga kerja pada kedua kawasan tersebut.

Banyak kendala yang penulis hadapi dalam rangka penyusunan tesis ini, dan hanya berkat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihaklah penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana mestinya. Dalam kesempatan ini, penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Paulus Uppun, S.E.,M.A. sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Madris, S.E.,DPS.,M.Si. sebagai Pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingannya yang diberikan selama menyelesaikan tesis ini.

Atas segala bantuan yang penulis terima selama mengikuti program S2, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi Unhas, Prof Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM. beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Unhas. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Fatmawati, S.E.,M.Si. sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Sumberdaya Unhas atas kesediaannya meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menjalani studi hingga selesai. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen yang pernah mengajar penulis pada Program Studi Ekonomi Sumberdaya Unhas dan kepada seluruh anggota tim penguji: Ibu Dr. Fatmawati, S.E.,M.Si., Dr. Sultan Suhab, S.E., M.Si., dan Dr. Ir. Muhammad Jibril Tajibu, S.E., M.Si. yang telah meluangkan waktu dalam meneliti keabsahan dan memberikan kritik serta saran yang sangat berguna atas penyempurnaan tesis ini. Terima kasih penulis ucapkan juga kepada seluruh staf akademik Fakultas Ekonomi dan Pascasarjana Ekonomi Unhas yang dengan senang hati membantu penulis dalam menyelesaikan urusan-urusan akademik.

Penulis tidak lupa untuk menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman Ilmu Ekonomi Unhas 2015 (Antares) dan teman-teman Mata17 semasa SMA yang masih *keep in touch* yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan moril serta kerja samanya. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Andi Muhammad Fatahillah dan teman berbagi ke-RECEH-an yaitu Fitriana Ansyar, S.E., Andi Nur Ildha Arfanita, S.E., dan Hildayana, S.E. yang senantiasa membantu, menemani, dan memberi semangat serta doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Terima Kasih penulis ucapkan juga kepada teman-teman ESD angkatan 2019/2020 yang telah membantu penulis semasa perkuliahan dan seluruh teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala canda tawa dan semangat yang kalian berikan.

Hal yang sama penulis ucapkan kepada Kakak, Adik, Sepupu, dan Keluarga Besar penulis, Dr. Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus, S.E., M.Si., Dr. Munawwarah S Mubarak, S.E., M.Si., Akbar Mandela Arumattulabala Yunus, S.E., M.Si., Adinda Eka Pratiwi, S.E., Adinda Asiah Minhikmah Alenapituleng Yunus, S.E., Keponakan saya Arufalah Masugiri Amanus Yunus, Alfajri Mubarak Amanus Yunus, Mahasura Satie Mandela Yunus, paman saya Alm. Syahran Ahmad, Lukman, BSC, Dr. H. Muchran, M.Si, H. Nurseda, SH, MH, Alm. Drs. H. Syahrudin dan H. Syahbur, SH, NOT, yang dengan tulus selalu memberikan motivasi, semangat dan turut mendoakan penulis untuk dapat menyelesaikan studi dengan baik.

Akhirnya, penulis mengucapkan rasa hormat dan penuh kepatuhan serta terima kasih yang tak terhingga atas keikhlasan kedua orang tua, Ayahanda Alm. Prof. Dr. H. Muhammad Yunus Zain, MA; dan Ibunda Prof. Dr. Hj. Rahmatia, MA, dalam mendidik, membesarkan dan mendoakan penulis. Penulis juga sangat bersyukur dan merasa beruntung karena tidak hanya sebagai orang tua, keduanya juga sangat berperan dalam memberikan petunjuk, saran dan motivasi kepada penulis dan juga mengajarkan berbagai hal tentang hitam-putihnya ilmu ekonomi serta meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Maha Suci Engkau Ya Allah tidaklah ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau telah beritahukan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui segala hikmah. Engkau memberi hikmah kepada siapa saja yang dianugerahi karunia yang banyak dan hanya orang berakallah yang dapat mengambil pelajaran. Wallahu 'alam.

Makassar, Februari 2021

Ayu Latifah Alfisyahrin

ABSTRAK

AYU LATIFAH ALFISYHRIN. *Analisis Komparatif Penyerapan Tenaga Kerja Pada Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI)* (Dibimbing oleh Paulus Uppun dan Madris).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh upah, pengeluaran pemerintah, *dummy* KBI atau KTI, *dummy* upah, dan *dummy* pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja, baik secara langsung maupun melalui investasi, mutu SDM, dan pertumbuhan ekonomi.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPB). Metode analisis yang digunakan adalah metode estimasi persamaan simultan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel upah berpengaruh negatif secara tidak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja melalui mutu SDM tetapi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, baik secara langsung maupun melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif secara langsung terhadap penyerapan tenaga kerja, berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja melalui mutu SDM, tetapi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi. Terdapat perbedaan pada Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) baik dari karakteristik kawasannya maupun efek variabel upah dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja. Baik *dummy* upah maupun variabel *dummy* lainnya memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja melalui mutu SDM. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh yang penting dalam mengatasi permasalahan penyerapan tenaga kerja. Kemudian KBI memiliki pengaruh yang lebih besar pada penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan KTI khususnya dari sisi kebijakan penetapan upah minimum yang melalui perbaikan mutu SDM. Sedangkan untuk pengeluaran pemerintah pada KTI memiliki peran yang lebih besar dalam mempengaruhi penyerapan tenaga kerja melalui perbaikan mutu SDM. Untuk itu mengefektifkan pengaruh pengeluaran pemerintah pada penyerapan tenaga kerja perlu dipusatkan pada KBI khususnya dalam perbaikan mutu SDM.

Kata Kunci: Penyerapan tenaga kerja, investasi, mutu SDM, pertumbuhan ekonomi, analisis komparasi, Kawasan Barat Indonesia (KBI), Kawasan Timur Indonesia (KTI)



ABSTRACT

AYU LATIFAH ALFISYHRIN. *The Comparative Analysis of Man Power Absorption in Western Part of Indonesia (WPI) and Eastern Part of Indonesia (EPI)* (Supervised by Paulus Uppun and Madris).

The research aims at analysing to what extent the effect of wage, government expenditure, dummy WPI and EPI, wage dummy, and government dummy on the man power absorption, either directly or through investment, human resource quality, and economic growth.

Data used were the secondary data which were obtained from the Statistical Centre Board and General Directorate of Financial Balance. The data were analysed using the simultaneous equation estimation method.

The research result indicates that the wage variable has the indirectly negative effect on the man power absorption through the human resource quality, but it doesn't influence on the man power absorption either directly or through the investment and economic growth. The government expenditure has the directly positive influence on the man power absorption, the indirectly positive effect on the man power absorption through human resource quality, but it doesn't affect on the man power absorption through investment and economic growth. There is the difference between WPI and EPI either from the regional characteristics or the effect of the wage and government expenditure variables on the man power absorption, either the wage or the other dummy variables have the influence on the man power absorption through human resource quality. This indicates that the education has the important effect in overcoming the man power absorption than EPI particularly resources quality improvement. Whereas, the government expenditure in EPI has the greater role in affecting the man power absorption through the man resources quality improvement. Therefore, making effectiveness of the government expenditure effect on the man power absorption necessarily focuses on WPI particularly in terms of the human resources improvement.

Key words: Man power absorption, investment, human resources quality, economic growth, comparative analysis, Western Part of Indonesia (WPI), Eastern Part of Indonesia



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN | iv |
| PRAKATA | vi |
| ABSTRAK..... | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah Pokok Penelitian..... | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| 2.1 Beberapa Kajian/Landasan Teoritis | 8 |
| 2.1.1 Berbagai Kajian Teoritis Terkait dengan Penyerapan Tenaga Kerja | 8 |
| 2.1.2 Berbagai Kajian Teoritis Terkait dengan Pertumbuhan Ekonomi..... | 11 |
| 2.1.3 Berbagai Kajian Teoritis Terkait dengan Mutu SDM..... | 12 |
| 2.1.4 Berbagai Kajian Teoritis Terkait dengan Investasi..... | 15 |
| 2.1.5 Kaitan Teoritis Upah Terhadap Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja..... | 17 |
| 2.1.6 Kaitan Teoritis Pengeluaran Pemerintah Terhadap Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja..... | 21 |
| 2.2 Beberapa Hasil Penelitian dan Studi Empiris Sebelumnya | 24 |
| BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS | 30 |
| 3.1 Kerangka Pemikiran | 30 |
| 3.2 Hipotesis | 35 |
| BAB IV METODE PENELITIAN | 38 |
| 4.1 Rancangan Penelitian..... | 38 |
| 4.2 Lokasi Penelitian..... | 38 |
| 4.3 Jenis dan Sumber Data | 38 |
| 4.4 Metode Pengumpulan Data..... | 39 |
| 4.5 Teknik Analisis Data | 40 |
| 4.6 Definisi Operasional..... | 47 |
| BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN | 49 |
| 5.1 Gambaran Umum Hasil Penelitian | 49 |
| 5.1.1 Kondisi Upah, Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Mutu SDM, Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga kerja pada Kawasan Barat Indonesia (KBI)..... | 49 |
| 5.1.2 Kondisi Upah, Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Mutu SDM, Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga kerja pada Kawasan Timur Indonesia (KTI) | 52 |

| | | |
|-----------------------|--|-----|
| 5.1.3 | Kondisi Upah, Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Mutu SDM, Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga kerja di Indonesia..... | 55 |
| 5.2 | Hasil Estimasi Komparasi Pengaruh Upah dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Investasi, Mutu SDM, Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja..... | 59 |
| 5.3 | Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian..... | 64 |
| 5.3.1 | Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja..... | 63 |
| 5.3.2 | Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja..... | 68 |
| 5.3.3 | Perbedaan Langsung dan Tidak Langsung <i>Dummy</i> KBI atau KTI terhadap Penyerapan Tenaga Kerja..... | 71 |
| 5.3.4 | Perbedaan Langsung dan Tidak Langsung <i>Dummy</i> Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja | 73 |
| 5.3.5 | Perbedaan Langsung dan Tidak Langsung <i>Dummy</i> Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja | 75 |
| 5.4 | Analisis dan Implikasi | 77 |
| 5.4.1 | Analisis dan Implikasi Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja..... | 77 |
| 5.4.2 | Analisis dan Implikasi Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja | 82 |
| 5.4.3 | Analisis dan Implikasi Perbedaan Langsung dan Tidak Langsung <i>Dummy</i> KBI atau KTI terhadap Penyerapan Tenaga Kerja | 87 |
| 5.4.4 | Analisis dan Implikasi Perbedaan Langsung dan Tidak Langsung <i>Dummy</i> Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja | 91 |
| 5.4.5 | Analisis dan Implikasi Perbedaan Langsung dan Tidak Langsung <i>Dummy</i> Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja..... | 95 |
| BAB VI | PENUTUP | 100 |
| 6.1 | Kesimpulan | 100 |
| 6.2 | Saran..... | 101 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 104 |
| LAMPIRAN | | 110 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Jumlah Pengangguran, Jumlah Angkatan Kerja, Proporsi Pengangguran, dan Proporsi Angkatan Kerja pada KBI dan KTI Tahun 2019..... | 3 |
| Tabel 2.1 Peta Beberapa Studi Terkait Sebelumnya | 26 |
| Tabel 4.1 Koefisien Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Baik Variable Eksogen Maupun Endogen Terhadap Variabel Pengangguran (Y_4)... | 43 |
| Tabel 5.1 Gambaran Umum Upah, Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Mutu SDM, Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga kerja Tahun 2010, 2015, dan 2019 pada KBI | 50 |
| Tabel 5.2 Gambaran Umum Upah, Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Mutu SDM, Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga kerja Tahun 2010, 2015, dan 2019 pada KTI..... | 53 |
| Tabel 5.3 Gambaran Umum Investasi, Mutu SDM, Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Provinsi di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) Tahun 2019..... | 56 |
| Tabel 5.4 Gambaran Umum Upah, Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Mutu SDM, Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja untuk Rata-Rata 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2019.... | 58 |
| Tabel 5.5 Hasil Estimasi Fungsi Investasi (Y_1), Mutu SDM (Y_2), Pertumbuhan Ekonomi (Y_3) dan Penyerapan Tenaga Kerja (Y_4) | 60 |
| Tabel 5.6 Hasil Estimasi Koefisien Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Baik Variabel Eksogen Maupun Endogen Terhadap Variabel Penyerapan Tenaga Kerja (Y_4) pada KBI dan KTI..... | 62 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian | 34 |
| Gambar 5.1 Hasil Estimasi Kerangka Konseptual Penelitian | 65 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Lampiran 1. Reduce Form | 110 |
| Lampiran 2. Data Mentah | 112 |
| Lampiran 3. Data Regersi | 126 |
| Lampiran 4. Hasil Estimasi Data | 133 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketersediaan lapangan pekerjaan selalu menjadi isu penting yang perlu untuk dikaji lebih lanjut karena menyangkut kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dimana, jumlah lapangan pekerjaan yang tidak mampu untuk menyerap seluruh angkatan kerja yang ada. Tentunya hal ini akan menciptakan permasalahan sosial-ekonomi, seperti tingginya angka kriminalitas akibat rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya.

Terlebih ketersediaan lapangan pekerjaan hanya berpusat pada wilayah-wilayah tertentu saja khususnya pada Kawasan Barat Indonesia (KBI). Hal inilah yang menyebabkan adanya ketimpangan ketersediaan lapangan pekerjaan yang menyebabkan wilayah yang maju akan semakin maju dengan sumberdaya manusia yang lebih besar dibandingkan wilayah lainnya. Sumberdaya manusia yang besar ini disebabkan oleh tenaga kerja yang melakukan migrasi dari Kawasan Timur Indonesia (KTI) ke Kawasan Barat Indonesia (KBI) yang lebih banyak jumlah lapangan pekerjaannya. Sehingga hal inilah yang menyebabkan adanya disparitas tenaga kerja antar KBI dan KTI (Kasau, 2016).

Kemudian penetapan upah minimum pada setiap provinsi juga dapat menciptakan disparitas tenaga kerja. Hal tersebut terjadi akibat upah minimum pada KBI lebih besar dibandingkan pada KTI yang menyebabkan tenaga kerja akan memilih untuk bermigrasi ke wilayah dengan upah yang lebih besar. Migrasi tenaga kerja ini nantinya dapat membuat jumlah tenaga kerja yang menawarkan jasanya meningkat pada wilayah tertentu saja. Dengan adanya upah minimum yang telah ditetapkan lapangan pekerjaan tidak dapat menyerap seluruh tambahan tenaga kerja tersebut.

Sementara itu, perlu diperhatikan lebih lanjut bahwa upah juga dapat menciptakan ilusi harga. Ilusi harga tercipta akibat kurangnya pemahaman masyarakat untuk membedakan harga nominal dan harga riil. Ketika masyarakat lebih memilih untuk bermigrasi pada wilayah dengan upah minimum yang lebih besar dibandingkan upah minimum yang ada di wilayahnya. Para pekerja mengabaikan fakta bahwa tingkat upah minimum yang lebih besar ditentukan oleh tingkat harga barang-barang secara umum di daerah tersebut. Sehingga upah yang lebih besar pada KBI belum tentu secara riil juga akan lebih besar dibandingkan dengan upah yang ada pada KTI (Krugman,1994).

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 Kawasan Barat Indonesia (KBI) yang merupakan pusat industri dan jasa nyatanya memiliki tingkat penyerapan angkatan kerja 0,12% lebih kecil dibandingkan dengan KTI pada tahun 2018 yang tentunya pengangguran terbuka pada KBI lebih besar dibandingkan pada KTI. Selanjutnya pada tahun 2019 penyerapan tenaga kerja meningkat 1,52% pada KBI dan 3,11% pada KTI. Hal ini menunjukkan bahwa tercipta disparitas penyerapan tenaga kerja pada kedua kawasan tersebut dengan nilai penyerpaan tenaga kerja pada KTI lebih besar daripada KBI.

Selanjutnya mengatasi permasalahan tenaga kerja memang tidak mudah, pemerintah harus mengikutsertakan peran pendidikan agar tenaga kerja dapat memenuhi kualifikasi yang baik untuk bekerja. Penguatan sumber daya manusia (sumber daya manusia mengacu pada pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan seorang pekerja) merupakan hal yang perlu dilakukan. Kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui peningkatan kualitas pendidikan (Suaidah, 2013).

Tabel 1.1 Jumlah Angkatan Kerja, Proporsi Angkatan Kerja, Jumlah Pengangguran, dan Proporsi Pengangguran pada KBI dan KTI Tahun 2018 dan 2019

| No | Provinsi | Penyerapan Tenaga Kerja (persen) | | Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) | |
|----|---|----------------------------------|-------|---------------------------------------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| 1. | KBI | 91.51 | 92.20 | 5.23 | 5.12 |
| | Sumatra | 90.89 | 92.14 | 5.06 | 4.97 |
| | Jawa | 92.61 | 92.96 | 5.85 | 5.69 |
| | Kalimantan | 91.41 | 91.21 | 4.71 | 4.63 |
| 2. | KTI | 91.63 | 94.48 | 4.13 | 4.11 |
| | Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara | 92.55 | 95.51 | 2.61 | 2.66 |
| | Sulawesi | 91.22 | 93.15 | 4.14 | 4.00 |
| | Kepulauan Maluku, Papua Barat dan Papua | 91.58 | 95.72 | 5.26 | 5.36 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 (diolah)

Tetapi dapat kita lihat berdasarkan data jumlah angkatan kerja dan pengangguran berdasarkan tingkat pengangguran yang dikeluarkan oleh BPS pada tahun 2019 angkatan kerja dengan pendidikan tertinggi SMA/SMK-lah yang mendominasi yaitu sebesar 71,7% dengan persentase pengangguran sebesar 76,8% jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan S1/Diploma yaitu hanya sebesar 12,8% dengan pengangguran sebesar 16,3%. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja dan orang-orang yang sedang mencari pekerjaan didominasi oleh angkatan kerja dengan tingkat pendidikan yang tergolong rendah.

Kondisi ekonomi yang berbeda pada kawasan Indonesia barat dan Indonesia timur juga sangat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang semakin baik tentunya akan berkorelasi positif dengan tersedianya

lapangan pekerjaan. Tetapi pembangunan yang hanya berpusat pada kawasan barat saja dan tingginya migrasi penduduk ke daerah yang perputaran modalnya lebih baik menyebabkan KTI yang tertinggal akan semakin tertinggal. Akibat aktivitas ekonomi di KTI yang tidak lebih produktif dibandingkan KBI yang menyebabkan kesempatan kerja, tenaga kerja, bahkan upah relatif lebih rendah (Sukwika, 2018).

Dampak atas tidak meratanya persebaran tenaga kerja akibat disparitas pembangunan dan tingkat upah di KBI dan kawasan timur Indonesia menyebabkan masalah-masalah ketenagakerjaan seperti pertumbuhan lapangan pekerjaan tidak merata, arus migrasi besar-besaran tenaga kerja dari KTI ke KBI, dan jumlah pengangguran yang terus meningkat di berbagai daerah. Berbagai kebijakan telah ditetapkan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia tetapi masih belum mampu menciptakan pemerataan pertumbuhan kesempatan kerja (Kasau, 2016).

Kemudian tidak hanya kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan yang dapat menciptakan pengangguran, kesediaan pekerja untuk bekerja pada tingkat upah tertentu juga dapat mempengaruhi. Dimana pada umumnya pekerja dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan lebih selektif dalam memilih pekerjaan dengan tingkat upah tertentu. Pekerja akan memilih tingkat upah yang dapat memenuhi kehidupan yang layak bagi dirinya. Sehingga pekerja akan memilih untuk menganggur atau berpindah ke wilayah yang lebih menjanjikan (Malcomson, 1981).

Peranan pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyejahterakan seluruh masyarakat. Pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk kegiatan produktif seperti belanja modal untuk pembangunan infrastruktur, serta prasarana lainnya yang akan memudahkan proses produksi, dapat menciptakan *multiplier effect* pada sektor-sektor perekonomian lainnya. Hal ini dapat

disebabkan oleh peningkatan pengeluaran pemerintah yang menstimulus perekonomian dan pada akhirnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi jumlah pengangguran. Peningkatan modal sangat berperan penting untuk meningkatkan perekonomian serta menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap pertambahan jumlah angkatan kerja (Todaro, 2013).

Disparitas penyerapan tenaga kerja yang dapat menciptakan masalah-masalah ketenagakerjaan menjadi landasan penulis untuk melakukan kajian tentang bagaimana upah, pengeluaran pemerintah, investasi, mutu SDM dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kawasan Indonesia Barat dan Kawasan Indonesia Timur dengan judul **Analisis Komparatif Penyerapan Tenaga Kerja pada Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI)**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Upah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui investasi, mutu SDM dan pertumbuhan ekonomi?
2. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui investasi, mutu SDM dan pertumbuhan ekonomi?
3. Apakah terdapat perbedaan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) terhadap investasi, mutu SDM, pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja?
4. Apakah terdapat perbedaan upah pada Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) terhadap investasi, mutu SDM, pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja?

5. Apakah ada perbedaan pengeluaran pemerintah pada Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) terhadap investasi, mutu SDM, pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui investasi, mutu SDM dan pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui investasi, mutu SDM dan pertumbuhan ekonomi.
3. Untuk menganalisis perbedaan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) terhadap investasi, mutu SDM dan pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja.
4. Untuk menganalisis perbedaan upah pada Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) terhadap investasi, mutu SDM dan pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja.
5. Untuk menganalisis perbedaan pengeluaran pemerintah pada Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) terhadap investasi, mutu SDM dan pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil kajian ini akan memberikan kontribusi terhadap pengambil kebijakan dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penentu kebijakan dalam mengatasi permasalahan ketidakseimbangan pasar tenaga kerja yang dapat menciptakan pengangguran baik pada KBI maupun pada KTI. Penelitian ini juga diharapkan dapat

menjadi suatu evaluasi kinerja makroekonomi di Indonesia dengan variabel-variabel yang telah ditentukan pada rumusan masalah baik pada KBI maupun pada KTI.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Beberapa Kajian/Landasan Teoritis

Fokus utama dari kajian teoretis ini adalah pembahasan tentang upah, pengeluaran pemerintah, investasi, mutu SDM, pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja.

2.1.1 Berbagai Kajian Teoritis Terkait dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Perkembangan studi Ilmu ekonomi makro mempelajari struktur, kinerja dan perilaku ekonomi secara keseluruhan. Pusat perhatian dari penelitian ilmu ekonomi makro ialah pemahaman terhadap faktor-faktor penentu dari kecenderungan umum dalam perekonomian yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, inflasi, dan transaksi internasional. Kinerja perekonomian yang baik tentu saja dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan inflasi yang rendah serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di mana terdapat hubungan yang erat antar kebijakan dan kinerja perekonomian (Snowdown dan Vane, 2005).

Pemikiran Keynes (1936) merupakan tonggak ilmu ekonomi makro modern, meskipun sebelum itu Klasik telah membahas mengenai tenaga kerja, siklus bisnis, inflasi dan pertumbuhan, namun pembahasannya menggunakan pendekatan mikro, dengan menggunakan mekanisme pasar. Kemudian depresi besar menunjukkan bahwa mekanisme pasar dan asumsi kesempurnaan informasi tidak bisa diandalkan. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam depresi besar, mekanisme pasar gagal dalam mengoordinasikan perekonomian. Sehingga Keynes (1936) mengatakan perlu adanya pihak ketiga (pemerintah) melakukan koordinasi untuk mengatasi kegagalan tersebut.

Kehadiran teori Keynes terutama berkaitan dengan ide kegagalan pasar, dan pengangguran yang terpaksa (*involuntary unemployment*) mempersulit rekonsiliasi antara kubu Keynes dan Klasik (Snowdown dan Vane, 2005). Teori keseimbangan umum mengatakan bahwa akan terjadi keseimbangan di setiap pasar. Menurut pandangan klasik, apabila terjadi surplus tenaga kerja dalam hal ini pengangguran dapat dicegah dengan mekanisme harga di pasar bebas agar permintaan yang tercipta dapat menyerap semua penawaran.

Mis-alokasi sumber daya yang dapat menyebabkan permasalahan tenaga kerja ini bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga (Gilarso, 2004). Sehingga jika terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja maka upah akan turun pada tingkat keseimbangan yang menyebabkan biaya produksi akan turun dan permintaan tenaga kerja akan terus meningkat karena produsen mampu melakukan perluasan produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari penurunan upah.

Pasar Tenaga Kerja mengikuti pasar barang apabila *output* naik maka jumlah orang yang mendapat pekerjaan atau penyerapan tenaga kerja juga naik begitupun sebaliknya. Keynes menekankan bahwa proses makro adalah proses menuju keseimbangan umum (*general equilibrium*). Apabila terjadi suatu perubahan (misalnya, I atau G atau MS berubah), maka akan mempunyai pengaruh berantai terhadap semua pasar (Mankiw, 2008).

Menurut Keynes (1936), hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja. Sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah dalam

mempertahankan tingkat permintaan agregat agar seluruh sektor perekonomian dapat menciptakan lapangan pekerjaan (Soesastro et al., 2005).

Greenwald dan Stiglitz (1987) berpendapat bahwa kedua aliran Klasik dan Keynes dapat disatukan dengan dua cara, yaitu teori makro diaplikasikan dalam teori mikro (pendekatan *New Clasical*), selanjutnya teori mikro diaplikasikan dalam teori makro (pendekatan Keynesian Baru). Kemudian, pemikiran Keynes dikritik oleh new classical yang dipelopori oleh Lucas yang menyatakan bahwa intervensi pemerintah untuk stabilitas justru akan membuat gejolak perekonomian semakin tidak stabil. Kelompok ini berpendapat bahwa perekonomian kapitalis secara alamiah membawa kestabilan sehingga tidak perlu ada campur tangan pihak ketiga, yang dimana pihak ketiga hanya akan menyebabkan adanya kejutan (*shock*) yang tidak diantisipasi dan merupakan sumber terjadinya gejolak perekonomian. Sehingga dalam hal ini campur tangan pemerintah tidak diperlukan.

Sama halnya dengan pemikiran Keynes, Davidson (1998) sebagai tokoh dari pemikiran *Post Keynesian*, berpendapat bahwa *involuntary* unemployment dapat dijelaskan dari ketidak cukupan *effective* demand, ketidakstabilan nilai tukar, dan mobilitas internasional dari keuangan yang menciptakan ketidakpastian dapat melemahkan kepercayaan produsen dalam menciptakan investasi yang dapat mengurangi pengangguran.

Kemudian tenaga kerja yang ingin bekerja pada suatu tingkat upah tertentu akan dengan mudah mendapatkan pekerjaan (Sukirno, 2010). Pandangan lain tentang kesempatan kerja adalah kesempatan kerja sebagai lapangan pekerjaan yang sudah diisi (*employment*) dan lapangan pekerjaan yang masih lowong (*vanacy*). Dari lapangan pekerjaan yang masih lowong tersebut timbul kebutuhan tenaga kerja. Adanya kebutuhan tersebut berarti ada kesempatan kerja bagi orang yang menganggur. Dengan

diisinya lapangan pekerjaan oleh para penganggur itu, maka berarti kesempatan kerja adalah lapangan pekerjaan yang sudah diduduki/diisi (Hakim, 2004).

Selanjutnya penyerapan tenaga kerja yang dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja, atau sumber daya produktif lainnya, adalah permintaan turunan. Ini berarti bahwa permintaan tenaga kerja bergantung pada permintaan akan barang atau jasa yang digunakan untuk diproduksi atau disediakan. Di bidang manufaktur, tenaga kerja diminta untuk berkontribusi terhadap produksi produk-produk seperti mobil, pesawat televisi, atau roti. Dengan demikian, penurunan permintaan mobil akan mengurangi permintaan pekerja otomotif. Di sektor jasa, tenaga kerja dibutuhkan oleh perusahaan karena secara langsung memberikan keuntungan terhadap konsumen. Peningkatan permintaan akan layanan penitipan anak, misalnya, akan meningkatkan permintaan akan pekerja penitipan anak. Fakta bahwa permintaan tenaga kerja adalah permintaan turunan berarti bahwa kekuatan permintaan untuk jenis tenaga kerja tertentu akan bergantung pada (1) seberapa produktif tenaga kerja tersebut dalam membantu menciptakan suatu produk atau jasa dan (2) nilai pasar dari barang itu (McConnell, 2017).

2.1.2 Berbagai Kajian Teoritis Terkait dengan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sulistiyanti (2010) di dalam pasar kerja, sumber dari permintaan terhadap tenaga kerja ialah dunia usaha yang tersebar di berbagai sektor ekonomi. Skala output yang akan dihasilkan oleh dunia usaha menentukan seberapa banyak faktor-faktor produksi akan digunakan dalam proses produksi. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi, yang permintaannya antara lain ditentukan oleh; tingkat substitusi antara tenaga kerja dengan faktor produksi lain, permintaan terhadap output yang dihasilkan, tingkat substitusi antara tenaga kerja dengan faktor produksi lain, besarnya upah pekerja, motivasi perusahaan dan produktivitas tenaga kerja.

Teori pertumbuhan Harrod Domar yang merumuskan pertumbuhan ekonomi dalam keadaan mantap (*steady growth*) sebagai fungsi linier terhadap besarnya PDB dengan gradient arah garis adalah perkalian antara rasio modal produksi (kebalikan COR) dengan kecenderungan menabung marginal (MPS). Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang berasal dari pertumbuhan PDB tergantung pada besar kecilnya COR (*Capital Output Ratio*) dan MPS (*Marginal Propensity to Save*) serta besarnya bagian pertumbuhan ekonomi itu yang dialokasikan untuk kesempatan kerja baru (Todaro, 2013).

Teori pertumbuhan Robert M. Solow dan James E. Meade, yang mengkritisi kelemahan teori Harrod Domar yang dianggap sangat rentan terhadap bahaya inflasi dan depresi berkepanjangan jika asumsi syarat keseimbangan tidak dipenuhi (*warranted growth* tidak sama dengan *natural growth*). Kemudian Solow menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas yang mengizinkan capital dan tenaga kerja untuk tumbuh pada tingkat yang berbeda. Sementara Meade menggeneralisir lebih jauh dengan menambahkan faktor tanah dan trend waktu sebagai pengaruh perkembangan teknologi.

Kemudian secara umum Harijono (2010) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses penambahan kemampuan suatu daerah untuk memproduksi barang dan jasa. Peningkatan produksi ini akan meningkatkan kebutuhan input tenaga kerja, sehingga akan memperluas penyerapan kesempatan kerja.

2.1.3 Berbagai Kajian Teoritis Terkait dengan Mutu SDM

Secara konseptual, perkembangan terpenting dalam kebangkitan ekonomi tenaga kerja modern adalah revolusi '*Human capital*' yang terkait dengan Gary Becker dan Jacob Mincer. Analisis modal manusia berkonsentrasi pada pengambilan keputusan individu, terutama yang berkaitan dengan penawaran tenaga kerja yang sering dikaitkan

dengan sosiologi daripada ekonomi. Sebelum Human Capital Becker, banyak ekonom tenaga kerja cenderung menganggap keputusan pasokan tenaga kerja hanya didasarkan pada rasionalitas ekonomi dan karena teori dan analisis yang ketat dipandang sebagai bidang subjek yang buruk. Dengan menempatkan keputusan mengenai pendidikan dan bentuk lain dari peningkatan keterampilan dalam kerangka investasi dan mengembangkan implikasi seperti pada upah, waktu kerja, dan beragam bentuk perilaku lainnya, analisis modal manusia secara fundamental mengubah cara para ekonom melihat penawaran tenaga kerja (Macmillan, 2018).

Human capital menurut Backer ialah manusia bukan hanya sekedar sumber daya namun merupakan modal yang menghasilkan pengembalian dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kualitas dan kuantitas modal tersebut merupakan kegiatan investasi. Kemudian Davenport menyatakan bahwa human capital sebagai seluruh usaha yang dibawa tenaga kerja untuk diinvestasikan dalam pekerjaan mereka yang termasuk juga didalamnya kemampuan, tingkah laku, semangat dan waktu (Atmanti, 2005). Sehingga human capital merupakan nilai dan atau kualitas dari seseorang atau tenaga kerja yang menentukan seberapa potensial orang atau tenaga kerja tersebut bisa berproduksi dalam perekonomian terutama menghasilkan barang dan jasa (Suaidah dan Cahyono, 2013).

Pendidikan termasuk kedalam salah satu investasi pada bidang sumber daya manusia, yang dimana investasi dalam bentuk pendidikan dinamakan dengan *Human Capital* (teori modal manusia). Pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kesempatan kerja yang ada, karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula produktivitasnya. Sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui tamatan pendidikan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru (Sari, 2013).

Investasi pendidikan merupakan kegiatan yang dapat dinilai sebagai stock manusia, dimana nilai stock manusia setelah mengikuti pendidikan dengan berbagai jenis dan bentuk pendidikan diharapkan dapat meningkatkan nilai yang dapat berupa peningkatan penghasilan individu, peningkatan produktivitas kerja, dan peningkatan nilai rasional (*social benefit*) individu dibandingkan dengan sebelum mengesap pendidikan (Idris, 2007).

Investasi perusahaan dalam bentuk pelatihan umum dapat menjadi investasi yang agak berisiko bagi pemberi kerja, karena jika pemberi kerja mencoba mempertahankan kenaikan upah pasca-pelatihan di bawah peningkatan produktivitas pendapatan marjinal, pekerja yang terlatih dapat memilih keluar dan penyerapan tenaga kerja dapat menurun. Karena dengan pelatihan umum juga dapat meningkatkan produktivitas dengan pemberi kerja lain yang menyebabkan pekerja terlatih memiliki insentif untuk mencari tawaran upah yang lebih tinggi dari pemberi kerja yang tidak memiliki biaya pelatihan untuk dibayar (Ehrenberg, 2012).

Kemudian menurut Becker (1993) investasi pada pelatihan umum dapat terjadi hanya jika terdapat perjanjian tertulis antar tenaga kerja dan pemberi kerja karena biaya mobilitas yang tinggi. Sehingga perusahaan sering berinvestasi dalam pelatihan umum untuk para pekerjanya, dan investasi ini disebut-sebut sebagai alasan lain untuk percaya bahwa pasar tenaga kerja dicirikan oleh kondisi monopsonistik.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Zimmer (2016) mengenai pentingnya pendidikan terhadap pengangguran memperoleh bahwa pada jangka pendek pendidikan penting dalam mempengaruhi kemampuan individu yang menganggur agar dapat terserap pada lapangan pekerjaan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan kemungkinan pengangguran akan muncul dengan upah yang sebanding dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan baru.

Mengingat pentingnya peran pendidikan, maka investasi modal manusia melalui pendidikan di negara berkembang sangat diperlukan walaupun investasi di bidang pendidikan merupakan investasi jangka panjang secara makro dimana manfaatnya baru dapat dirasakan setelah puluhan tahun. Keterbatasan dana mengharuskan adanya penetapan prioritas dari berbagai pilihan kegiatan investasi di bidang pendidikan yang sesuai, dalam jangka panjang akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Investasi yang menguntungkan adalah investasi modal manusia untuk mempersiapkan kreativitas, produktivitas dan jiwa kompetitif dalam masyarakatnya (Atmanti, 2005).

Tingkat pendidikan angkatan kerja berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka kesempatan kerja akan semakin besar. Dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi seseorang akan lebih mudah mengakses informasi pekerjaan, memenuhi kualifikasi yang diinginkan pasar kerja sehingga memperbesar kemungkinan untuk diterima bekerja (Sadariawati, 2010). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Asiedu (2004) yang mengemukakan bahwa infrastruktur yang baik, pendapatan yang lebih tinggi, keterbukaan terhadap perdagangan dan angkatan kerja yang terdidik mempunyai dampak yang positif terhadap kesempatan kerja di Afrika.

2.1.4 Berbagai Kajian Teoritis Terkait dengan Investasi

Todaro (2013) menyatakan bahwa sumber daya yang akan digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan konsumsi pada masa yang akan datang disebut investasi. Sehingga investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelian barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian, dimana investasi dapat disebut juga sebagai penanaman modal atau pembentukan modal.

Menurut Ismei (2015), nilai investasi dapat menjadi salah satu faktor penentu laju pada pertumbuhan ekonomi dan selain dapat mendorong kenaikan *output* secara signifikan, investasi juga akan meningkatkan permintaan *input* yaitu tenaga kerja. Sehingga dengan adanya investasi dapat mendorong penyerapan tenaga kerja dan mempengaruhi penyediaan kesempatan kerja.

Peningkatan investasi pada suatu perusahaan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja karena dengan adanya peningkatan investasi maka akan meningkatkan jumlah perusahaan yang ada pada industri tersebut. Peningkatan jumlah perusahaan dapat meningkatkan jumlah *output* yang akan dihasilkan, sehingga lapangan pekerjaan meningkat dan akan mengurangi pengangguran atau akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Ismei et al, 2015).

Adapun teori yang menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi, modal fisik dan tenaga kerja yaitu teori fungsi produksi Cobb Douglas dalam teori ini menjelaskan adanya pembagian pendapatan nasional diantara modal dan tenaga kerja tetap konstan selama periode yang jangka panjang. Dengan kata lain, ketika perekonomian mengalami pertumbuhan yang baik, pendapatan total pemilik modal (investor) dan pendapatan total pekerja tumbuh pada tingkat yang nyaris sama (Mankiw, 2008).

Investasi yang ditanamkan pada suatu negara atau daerah ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu tingkat bunga, ekspektasi tingkat return, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat laba perusahaan, situasi politik, dan kemajuan teknologi (Sondakh, 2017). Adanya kegiatan investasi di suatu Negara atau daerah dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dan perluasan kesempatan kerja, karena investasi dapat menambah jumlah daripada kapital. Tanpa investasi maka tidak akan ada pabrik/mesin baru, dan dengan demikian tidak ada ekspansi.

Harrod Domar berpendapat bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Dengan asumsi “*full employment*”, maka semakin besar kapasitas produksi akan membutuhkan tenaga kerja yang semakin besar pula. Ini karena investasi merupakan penambahan faktor-faktor produksi, dimana salah satu dari faktor produksi adalah tenaga kerja (Putri, 2018). Dengan begitu, perekonomian dapat menyerap seluruh kelebihan tenaga tenaga kerja, sehingga dapat mengatasi ketidakseimbangan pasar tenaga kerja.

Kemudian Teori pembangunan Lewis yang menjelaskan mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja berasal dari investasi di sektor industri dan akumulasi modal secara keseluruhan di sektor modern akan menimbulkan perluasan *output* yang akan menyebabkan pengalihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor modern (industri) selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan *output* dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor modern (Todaro, 2013).

Selanjutnya hasil penelitian Sulistiawati (2012) menyatakan bahwa investasi berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan begitu pula pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi di Indonesia tetapi lain halnya dengan hubungan investasi dan penyerapan tenaga kerja yang berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif . Kenaikan investasi akan diikuti dengan kenaikan pada penyerapan tenaga kerja provinsi di Indonesia.

2.1.5 Kaitan Teoritis Upah terhadap Investasi, Mutu SDM, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penyerapan Tenaga Kerja

Hart (1980) berpendapat bahwa pada negara maju upah merupakan alat seleksi yang digunakan untuk memperoleh tenaga kerja yang berkualitas dengan upah sebagai pendorong produktivitas serta dapat menjadi mekanisme insentif bagi pekerja. Lain halnya pendapat Malcomson (1981) yang mengemukakan bahwa pekerja akan

menuntut upah berdasarkan tingkat produktivitasnya dengan besaran upah yang dibayarkan dapat berada di atas ataupun di bawah tingkat upah minimum.

Selanjutnya Wood (1994) menyatakan bahwa tenaga kerja yang berketerampilan rendah di negara maju dapat dirugikan dengan adanya hubungan perdagangan dengan negara berkembang yang dapat mengurangi upah pekerja berketerampilan rendah di Amerika Serikat dan Eropa. Sama halnya dengan pendapat Krugman (1994) yang juga berfokus pada pergeseran permintaan relatif untuk pekerja dengan keterampilan berbeda. Di Amerika Serikat perubahan teknologi telah diserap oleh ketidaksetaraan upah yang lebih besar. Sementara di Eropa, preferensi untuk perbedaan upah yang lebih rendah menyebabkan upah sebagian besar tenaga kerja meningkat yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan pengangguran (Bertola dan Ichino, 1995).

Mankiw (2008) menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja ialah upah. Penetapan tingkat upah oleh pemerintah daerah akan berdampak terhadap tinggi rendahnya penyerapan tenaga kerja yang terjadi di suatu daerah. Peningkatan nilai upah yang ditetapkan oleh pemerintah dalam kebijakan upah minimum dapat mengakibatkan penurunan jumlah orang yang bekerja di suatu wilayah (Kaufman dan Hotchkiss, 1999)

Kemudian permintaan tenaga kerja sangat berperan mengurangi pengangguran melalui upah minimum. Apabila kenaikan upah minimum yang dapat menyebabkan berkurangnya jumlah permintaan tenaga kerja, diimbangi dengan kenaikan investasi, tentunya hal ini akan memperbesar permintaan tenaga kerja (Mahayana, 2014). Hal yang sama diungkapkan oleh Stigler (1946) yang menyatakan bahwa upah yang melebihi upah ekuilibrium menyebabkan penawaran tenaga kerja akan melebihi permintaan tenaga kerja yang menciptakan surplus tenaga kerja. Sehingga akan terdapat persaingan diantara tenaga kerja dalam memperebutkan pekerjaan.

Wicaksono (2002) mengatakan bahwa secara teoritis, pada pasar sempurna, pengangguran dapat diartikan dengan *leisure*, karenanya pengangguran yang terjadi bersifat *voluntary*. Sementara penetapan tingkat upah minimum oleh pemerintah dapat menyebabkan pengangguran *involuntary*. Di Indonesia terdapat peraturan penetapan upah minimum, secara keseluruhan pasar tenaga kerja bersifat fleksibel, yang artinya penentuan upah dapat dilakukan secara individual maupun melalui serikat pekerja dan tidak sepenuhnya ditentukan oleh UMR.

Selanjutnya terdapat pengaruh timbal balik dalam hubungan internal antara upah dan pertumbuhan ekonomi. Singkatnya, pengaruh timbal balik antara upah dan pertumbuhan ekonomi tercermin dalam dua aspek. Bagi pekerja, upah berarti pendapatan, kenaikan upah akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan dapat mendorong permintaan konsumsi. Pada saat yang sama, upah berarti biaya perusahaan, peningkatan upah meningkatkan biaya produksi perusahaan yang dapat mengurangi efisiensi produksi perusahaan dan pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Melalui model simulasi upah multi-atribut yang ditingkatkan, diperoleh upah minimum dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan siklis dengan menggunakan analisis data aktual USA 1982 -2013 tahun (Xu, 2015).

Kemudian, rendah atau tidak sesuainya tingkat upah yang diperoleh dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta tanggungannya merupakan permasalahan yang langsung menyentuh para pekerja (Mansur et al., 2014). Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah maka pekerja dapat menolak mendapatkan upah tersebut yang akan berakibat pada tingginya tingkat pengangguran.

Teori kekakuan upah (*wage rigidity*) dijelaskan oleh Salvatore (2007). Menurut Salvatore teori yang signifikan untuk menjelaskan keadaan perekonomian di suatu daerah khususnya di Indonesia adalah teori kekakuan upah (*wage rigidity*), yaitu

gagalnya upah melakukan penyesuaian agar penawaran dan permintaan tenaga kerja sama. Jika kebijakan upah minimum diterapkan di atas tingkat keseimbangannya maka terjadi kekakuan upah, dimana upah tidak akan bergerak menuju ke titik keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja karena adanya batas oleh upah minimum. Sektor usaha akan mengurangi jumlah pekerja sehingga timbul pengangguran (Sarimuda dan Soekarnoto, 2014).

Berbeda dengan teori kekakuan upah, penelitian yang dilakukan oleh Poyoh *et al.* (2017) yang melihat hubungan upah dan pengangguran di Sulawesi Utara bersifat negatif. Hal ini dapat disebabkan oleh tingkat kenaikan upah berada di bawah titik keseimbangan pasar yang menyebabkan para penganggur segera mencari pekerjaan. Kemudian *Efficiency Wage Theory* menyatakan bahwa tingkat upah yang tinggi dapat mendorong para pekerja untuk giat bekerja dan meningkatkan produktivitasnya. Sehingga dengan pendapatan yang tinggi maka pekerja akan membeli makanan yang lebih bergizi untuk menambah energinya yang akan menambah tingkat produktivitasnya (Sumarsono, 2003).

Lain halnya dengan studi Mazumdar (2007) di India, yang mengamati perubahan kesempatan kerja berkaitan dengan perubahan tingkat upah. Mazumdar menyimpulkan bahwa ada *trade-off* antara *employment-growth* dengan *wage-growth*, artinya jika ada pertumbuhan upah, maka pertumbuhan kesempatan kerja menurun dan sebaliknya jika ada penurunan upah, maka kesempatan kerja akan meningkat. Hal ini menjelaskan bahwa upah yang tinggi akan menurunkan permintaan tenaga kerja.

Menurut Mankiw (2008) terdapat dua alasan terjadinya pengangguran, pertama karena dibutuhkannya waktu untuk mencocokkan antara para pekerja dengan pekerjaan yang dapat menciptakan pengangguran friksional. Kedua ialah kekakuan upah yang dimana ketika gagalnya upah melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja

sama dengan permintaanya yang menciptakan pengangguran struktural. Sehingga dari kedua penyebab tersebut dapat diperoleh dua jenis pengangguran berdasarkan penyebab terbentuknya.

Menurut Keynes (1963) upah sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang tidak terkait dengan pasar tenaga kerja dan mekanisme pembentukan upah tidak mampu mengembalikan keseimbangannya. Faktor riil yang membuat penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja cenderung seimbang bukanlah upah tetapi perubahan ketersediaan lapangan kerja, karena pengusaha menanggapi naik atau turunnya permintaan pasar akan produk dengan memberhentikan atau merekrut tenaga kerja. Setelah titik pekerjaan penuh tercapai, kenaikan upah memerlukan perluasan pasokan tenaga kerja dan kemudian aturan neoklasik berlaku dimana penentuan upah menggunakan mekanisme harga (Kryńska, 2010).

2.1.6 Kaitan Teoritis Pengeluaran Pemerintah Terhadap Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Mutu SDM dan Penyerapan Tenaga Kerja

Laksono (2016) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat memperbesar *output* yang dihasilkan oleh suatu sektor ekonomi. Selain itu, juga dapat menaikkan pendapatan masyarakat karena pengeluaran pemerintah akan menjadi penerimaan masyarakat sehingga mendorong permintaan agregat. Karena adanya kenaikan permintaan agregat sehingga mendorong produsen untuk meningkatkan *output* produksinya. Untuk itu, produsen memerlukan tambahan *input* produksi, salah satunya adalah tenaga kerja, sehingga akan tercipta kesempatan kerja baru. Dengan demikian, kenaikan pengeluaran pemerintah akan menambah kesempatan kerja baru bagi masyarakat. Proyek-proyek yang dibiayai oleh pemerintah seperti membangun jalan, sekolah, atau fasilitas lain umumnya bersifat padat karya sehingga dapat menaikkan penyerapan tenaga kerja dalam hal ini permintaan tenaga kerja akan meningkat.

Kemudian berdasarkan analisis empiris Brückner (2012) menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja dalam hal ini penawaran tenaga kerja, lapangan kerja (permintaan tenaga kerja), dan tingkat pengangguran dapat meningkat secara signifikan sebagai respons terhadap guncangan pengeluaran pemerintah di banyak negara OECD. Hasilnya kuat untuk skema identifikasi alternatif, penyertaan variabel kontrol, dan sub periode yang berbeda untuk sebagian besar negara kecuali Amerika Serikat, di mana respons pengangguran terhadap guncangan fiskal tampaknya telah mengubah pola secara substansial dari waktu ke waktu. Sejalan dengan hasil penelitian Isiaka (2020) menunjukkan bahwa dampak pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran bersifat ambigu. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja tetapi belum tentu mengurangi pengangguran.

Menurut Harrod Domar terdapat berbagai macam pengeluaran pemerintah akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini peran investasi yang menjadi aspek utama, dimana investasi berdampak positif melalui proses *multiplier effect* terhadap permintaan agregat dan penawaran agregat melalui pengaruh kapasitas produksi (Todaro, 2013).

Kemudian menurut pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai investasi yang menambahkan kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang, pengeluaran langsung memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagai penghemat pengeluaran yang akan datang. Tidak hanya itu pengeluaran pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih besar dan penyebaran tenaga kerja yang lebih luas (Sodik, 2007).

Selanjutnya Cottarelli (2012) dalam studi deskriptif besar pada sampel yang terdiri dari beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dalam bentuk tunjangan pengangguran mengurangi pengangguran ketika

didistribusikan dengan jangka waktu yang pendek. Berbeda dengan penelitian Abubakar (2016) yang melakukan kajian mengenai pengangguran di Nigeria tahun 1981-2015 berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah tidak mengurangi pengangguran tetapi malah meningkatkan jumlah pengangguran.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi perhitungan pertumbuhan ekonomi tetapi pengaruhnya relatif lebih kecil dibandingkan variabel lainnya. Tetapi pengeluaran pemerintah juga menjadi hal yang krusial karena mempunyai efek sosial politis yang strategis sebagai fungsi alokasi, distribusi, maupun stabilisasi. Tidak hanya itu, pengeluaran pemerintah pun mempunyai efek multiplier terhadap ekonomi makro riil dalam pergerakan jangka pendek dari *output* dan ketenagakerjaan (Samuelson dan Nordhaus, 2010).

Terdapat berbagai macam pengeluaran pemerintah yang dapat memberikan kontribusi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang tinggi akan meningkatkan kesempatan kerja, investasi dan profitabilitas yang akan mempengaruhi permintaan agregat. Pengaruh terhadap permintaan agregat inilah yang nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Diamond, 1989).

Selanjutnya penelitian Harijono (2013) yang tidak sepenuhnya sesuai dengan teori makro Keynes, karena walau investasi sektor pemerintah dan swasta berpengaruh kuat terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi pengaruhnya terhadap perluasan kesempatan kerja ternyata lemah. Hal tersebut disebabkan oleh investasi swasta berpengaruh lemah terhadap kesempatan kerja di Provinsi Bali sehingga pengaruh pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali terhadap kesempatan kerja pun menjadi lemah pula.

2.2 Beberapa Hasil Penelitian dan Studi Empiris Sebelumnya

Terdapat beberapa hasil penelitian dan studi empiris yang pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan kesempatan kerja. Kasau (2016) dalam penelitiannya mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kesempatan kerja melalui investasi dan dampaknya pada Kawasan Timur dan Barat Indonesia. Variabel yang digunakan ialah pengeluaran pemerintah, pembeda intersepsi, pembeda slope1 (pengeluaran pemerintah terhadap kesempatan kerja), dan pembeda slope 2 (investasi terhadap kesempatan kerja). Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah *Struktural Equation Modelling* (SEM) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi dan kesempatan kerja baik langsung, tidak langsung maupun secara total. Demikian juga halnya pengaruh investasi terhadap kesempatan kerja baik di KTI maupun di KBI. Namun pengaruh di KTI lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh di KBI.

ŞERB (2016) dalam penelitiannya mengenai analisis tingkat kesempatan kerja dari perspektif faktor-faktor penentunya dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, imigran, dan kesempatan kerja di Romania. Penelitian ini menggunakan model regresi linear dengan hasil yang diperoleh ialah Hasil penelitian diperoleh jumlah penduduk dan tingkat lapangan kerja terdapat hubungan sebab akibat, dan intensitas yang kuat antara keduanya. Hasil koefisien korelasi menunjukkan bahwa antara proyeksi penduduk dengan variabel penyebab-tingkat lapangan kerja (sumber daya kerja) terdapat korelasi, pada dasarnya data menunjukkan korelasi deterministik. Tingkat kesempatan kerja telah menurun sebagai akibat dari peningkatan jumlah imigran, sementara antara jumlah total imigran permanen dan tingkat kesempatan kerja terdapat hubungan balik yang lemah.

Jamir (2017) dalam penelitiannya mengenai pengaruh pendidikan terhadap kesempatan kerja, pendapatan dan kemiskinan di Nagaland dengan variabel yang digunakan adalah pendidikan, kesempatan kerja, pendapatan, dan kemiskinan. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear yang menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pendidikan terhadap pendapatan dan kesempatan kerja menunjukkan bahwa, semakin tinggi tingkat pendidikan kepala rumah tangga maka semakin tinggi pula tingkat pekerjaan dan pendapatan serta diketahui pula bahwa pencapaian pendidikan rumah tangga dan tingkat kemiskinan berhubungan berbanding terbalik.

Sitompul (2019) dalam penelitiannya mengenai analisis dari pengaruh GDP, FDI, dan upah minimum terhadap Kesempatan Kerja di Indonesia dengan variabel yang digunakan ialah Produk Domestik Bruto (PDB), *Foreign Direct Investment* (FDI), upah minimum, dan Kesempatan Kerja. Model yang digunakan yaitu *Multiple linear regression* dengan hasil yang diperoleh ialah PDB dan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia, sedangkan variabel FDI tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara parsial, PDB dan upah minimum masing-masing memiliki pengaruh yang sama, yaitu positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Dari ketiga variabel independen tersebut, PDB memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Adeem (2019) dalam penelitiannya mengenai Penentu Sosial-Ekonomi Pekerjaan di Pakistan dengan variabel yang digunakan adalah tingkat kesempatan kerja, PDB per kapita, penerimaan pada sekolah menengah, Perdagangan, FDI, stabilitas politik, pembentukan modal tetap bruto, Jumlah uang beredar, dan pengeluaran pemerintah. Model yang digunakan ialah regresi linear dan diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa PDB per kapita dan pengeluaran pemerintah

memiliki hubungan positif yang signifikan dengan penyerapan tenaga kerja baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang. Hubungan empiris yang patut dicatat ditemukan dalam jangka panjang antara pembentukan modal tetap bruto, sedangkan dalam waktu singkat menunjukkan hubungan destruktif dengan penyerapan tenaga kerja. Sedangkan FDI menunjukkan tingkat hubungan yang signifikan dan positif baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Pendaftaran sekolah menengah memiliki hubungan yang signifikan dan positif dengan kesempatan kerja baik dalam jangka waktu panjang maupun jangka pendek. Hubungan jumlah uang beredar dengan kesempatan kerja dalam jangka panjang adalah positif sedangkan dalam jangka pendek menunjukkan hubungan yang signifikan tetapi negatif dengan lapangan kerja. Stabilitas perdagangan dan politik keduanya merupakan faktor utama untuk memperkirakan kekuatan suatu perekonomian. Menurut kajian ini, perdagangan dan stabilitas politik menunjukkan hubungan yang signifikan dan positif dengan lapangan kerja dalam jangka panjang sedangkan dalam jangka pendek keduanya menunjukkan hubungan negatif dengan lapangan kerja.

Tabel 2.1 Peta Beberapa Studi Terkait Sebelumnya

| No. | Penulis | Judul | Variabel | Metode | Temuan Utama |
|-----|---|--|--|--|--|
| 1. | Matius Irsan Kasau Rahmat Laan (2016) | Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Investasi dan Dampaknya pada Kawasan Timur dan Barat Indonesia | Pengeluaran Pemerintah Pembeda Intersepsi Pembeda Slope1 (Pengeluaran Pemerintah terhadap Kesempatan Kerja) Pembeda Slope 2 (Investasi terhadap | <i>Struktural Equation Modelling</i> (SEM) | Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Investasi dan Kesempatan Kerja baik langsung, tidak langsung maupun secara total. Demikian juga halnya pengaruh Investasi terhadap kesempatan Kerja baik di KTI maupun di KBI. Namun pengaruh di KTI lebih kecil |

| No. | Penulis | Judul | Variabel | Metode | Temuan Utama |
|-----|--|---|--|--------------------------------|--|
| | | | Kesempatan Kerja) | | dibandingkan dengan pengaruh di KBI. |
| 2. | Diana ŞERB Nicoleta CICIOC Maria PĂUN Constanța FUNIERU (2016) | <i>Employment Level Analysis from The Determinant Factors Perspective</i> | <i>Population Immigrants Employment</i> | <i>Linear-regression Model</i> | Hasil penelitian diperoleh jumlah penduduk dan tingkat lapangan kerja terdapat hubungan sebab akibat, dan intensitas yang kuat antara keduanya. Hasil koefisien korelasi menunjukkan bahwa antara proyeksi penduduk dengan variabel penyebab-tingkat lapangan kerja (sumber daya kerja) terdapat korelasi, pada dasarnya data menunjukkan korelasi deterministik. Tingkat kesempatan kerja telah menurun sebagai akibat dari peningkatan jumlah imigran, sementara antara jumlah total imigran permanen dan tingkat kesempatan kerja terdapat hubungan balik yang lemah. |
| 3. | Chubakumzuk Jamir T. Zarenthung Ezung (2017) | <i>Impact of Education on Employment, Income and Poverty in Nagaland</i> | Pendidikan Kesempatan Kerja Pendapatan Kemiskinan | <i>Linear-regression Model</i> | Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pendidikan terhadap pendapatan dan kesempatan kerja menunjukkan bahwa, semakin tinggi tingkat pendidikan kepala rumah tangga maka semakin tinggi pula tingkat pekerjaan dan pendapatan. Diketahui pula bahwa pencapaian pendidikan rumah tangga dan tingkat kemiskinan berhubungan berbanding terbalik. |

| No. | Penulis | Judul | Variabel | Metode | Temuan Utama |
|-----|--|--|--|--|--|
| 4. | Thomson Sitompul Yansen Simangunsong (2019) | <i>The Analysis of the Impact of GDP, FDI, Minimum Wage on Employment in Indonesia</i> | Produk Domestik Bruto (PDB) <i>Foreign Direct Investment (FDI)</i> Upah Minimum Kesempatan Kerja | <i>Multiple Linear Regression Models</i> | PDB dan Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia, sedangkan variabel FDI tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara parsial, PDB dan Upah Minimum masing-masing memiliki pengaruh yang sama, yaitu positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Dari ketiga variabel independen tersebut, PDB memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. |
| 5. | Muhammad Atif Adeem Muhammad Sibte-Ali Raheel Akhtar (2019) | Socio-Economic Determinants of Employment: A Case study of Pakistan | <i>Employment Rate</i> <i>Per Capita of Gross Domestic Product</i> <i>Enrollment in Secondary School</i> <i>Trade</i> <i>FDI</i> <i>Political Stability</i> <i>Gross Fixed Capital Formation</i> <i>Money Supply</i> <i>Government Expenditure</i> | <i>Linear-regression Model</i> | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDB per kapita dan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan positif yang signifikan dengan penyerapan tenaga kerja baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang. FDI menunjukkan tingkat hubungan yang signifikan dan positif baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Pendaftaran sekolah menengah memiliki hubungan yang signifikan dan positif dengan kesempatan kerja baik dalam jangka waktu panjang maupun jangka pendek. Hubungan jumlah uang beredar dengan kesempatan kerja dalam jangka panjang adalah positif sedangkan dalam jangka pendek menunjukkan hubungan yang signifikan tetapi negatif |

| No. | Penulis | Judul | Variabel | Metode | Temuan Utama |
|-----|---------|-------|----------|--------|--|
| | | | | | dengan lapangan kerja. Menurut kajian ini, perdagangan dan stabilitas politik menunjukkan hubungan yang signifikan dan positif dengan lapangan kerja dalam jangka panjang sedangkan dalam jangka pendek keduanya menunjukkan hubungan negatif dengan lapangan kerja. |

BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Pemikiran

Tenaga Kerja seperti komoditas atau aktivitas lainnya tergantung pada mekanisme pasar yaitu permintaan dan penawaran. Ketidakseimbangan selalu terjadi pada pasar tenaga kerja akibat adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja. Akibat dari adanya ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja dapat menyebabkan pengangguran yaitu kondisi dimana penawaran tenaga kerja yang lebih besar dari permintaan tenaga kerja menyebabkan adanya surplus tenaga kerja yang tidak terserap ke dalam lapangan pekerjaan (Gilarso, 2004).

Tenaga kerja merupakan faktor produksi dengan upah sebagai harga yang harus dibayarkan oleh produsen. Penetapan upah minimum yang mengikuti Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masyarakat dapat berpengaruh terhadap biaya produksi. Peningkatan upah dapat menyebabkan produsen mengurangi penggunaan jumlah tenaga kerja guna menekan peningkatan biaya produksi yang dapat mengakibatkan berkurangnya kesempatan kerja. Sehingga hal ini menunjukkan adanya pengaruh langsung secara negatif dari upah terhadap penyerapan tenaga kerja (Xu, 2015).

Penentuan nilai upah dapat menentukan besar kecilnya nilai investasi dengan memandang upah sebagai biaya produksi. Upah buruh yang rendah akan menurunkan beban biaya dan akan meningkatkan laba perusahaan. Hal inilah yang dapat menarik investor untuk meningkatkan investasinya. Peningkatan investasi dapat mendorong ekspansi perusahaan yang tentunya dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Sehingga hubungan upah dan penyerapan tenaga kerja adalah negatif melalui investasi (Tapparan, 2017).

Peningkatan upah dipandang sebagai insentif bagi pekerja yang dapat menciptakan tenaga kerja lebih produktif akibat adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia dalam jenjang pendidikan. Kemudian semakin baik mutu sumberdaya manusia, maka semakin mudah terserap ke dalam lapangan pekerjaan. Hal ini dapat terjadi akibat tenaga kerja yang berpendidikan tersebut tidak hanya dapat menjadi pekerja, tetapi juga dapat menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri. Sehingga hubungan upah dan penyerapan tenaga kerja melalui mutu SDM adalah positif (Bucahri, 2016).

Selanjutnya upah yang dipandang sebagai biaya perusahaan akan menyebabkan setiap peningkatan upah akan meningkatkan biaya perusahaan yang dapat mengurangi efisiensi produksi. Produksi yang menurun dapat mengurangi laba perusahaan dan menghambat ekspansi ekonomi yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang menurun akibat tidak terciptanya ekspansi ekonomi akan mengurangi jumlah kesempatan kerja. Sehingga hubungan upah dan penyerapan tenaga kerja adalah negatif melalui pertumbuhan ekonomi (Rusniati, 2018).

Dengan adanya peningkatan jumlah pengeluaran pemerintah dapat mendorong giatnya aktivitas ekonomi yang dapat mendorong produsen meningkatkan kapasitas produksinya. Peningkatan kapasitas produksi membutuhkan tambahan *input* yaitu dengan menambah jumlah tenaga kerja. Penambahan jumlah tenaga kerja dapat memperluas kesempatan kerja. Sehingga hubungan langsung pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja adalah positif (Brückner, 2012).

Investasi oleh pemerintah dalam bentuk belanja modal yang digunakan untuk kegiatan produktif seperti membangun infrastruktur jalan dan prasarana lainnya dapat mempermudah proses produksi suatu perusahaan serta memberikan efek *multiplier* pada sektor perekonomian lainnya. Kemudahan proses produksi yang dapat

meningkatkan kapasitas produksi akan membuka lapangan pekerjaan baru yang lebih besar. Sehingga hubungan Pengeluaran pemerintah dalam belanja modal dan investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja adalah positif melalui investasi (Harijono, 2013).

Pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja modal ini dapat menstimulus perekonomian yang berdampak pada perbaikan mutu SDM. Infrastruktur yang semakin baik yang diikuti dengan kualitas tenaga kerja yang semakin bagus pula akan menyerap tenaga kerja baru. Dimana tenaga kerja yang berkualitas ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Sehingga hubungan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja melalui mutu SDM adalah positif (Wilis, 2016).

Pengeluaran pemerintah dalam menciptakan infrastruktur untuk mendorong perkembangan sektor-sektor produktif menarik tenaga kerja untuk masuk kedalam pasar tenaga kerja. Perkembangan sektor-sektor produktif ini dapat menciptakan ekspansi ekonomi yang mempengaruhi permintaan agregat. Pengaruh terhadap permintaan agregat inilah yang nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akibat berkembangnya sektor-sektor produktif dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Sehingga hubungan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi adalah positif (Diamond, 1989).

Investasi yang merupakan akumulasi modal dapat menciptakan perluasan *output*. Perluasan *output* membutuhkan penambahan faktor-faktor produksi yang dimana salah satu dari faktor produksi adalah tenaga kerja. Sehingga dengan adanya peningkatan jumlah investasi dapat membuka kesempatan kerja baru. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dan penyerapan tenaga kerja berhubungan positif secara langsung (Syaihu, 2012).

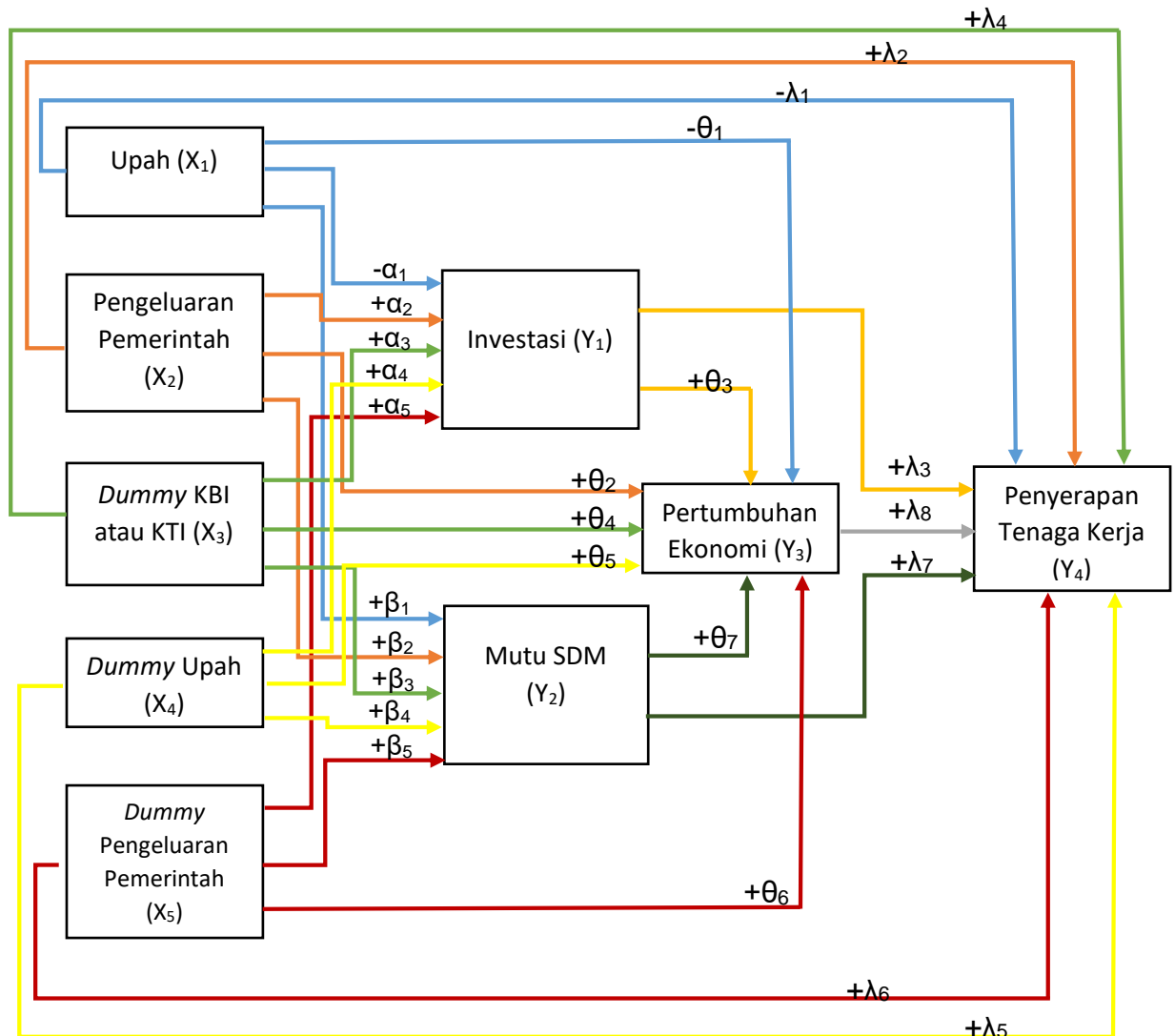
Investasi swasta baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) yang akan mendorong peningkatan produksi yang akan mendorong peningkatan permintaan aggregate. Peningkatan permintaan aggregate akan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Tentunya ketika investasi yang terus didorong bersifat pada karya maka tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Sehingga hal ini menggambarkan hubungan positif antara investasi dan penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi (Ismei, 2015).

Mutu sumberdaya manusia yang terus meningkat dapat menciptakan pekerja dengan kualitas yang lebih baik. Tenaga kerja yang berkualitas akan dengan mudah mengakses informasi pekerjaan dan memenuhi kualifikasi pasar tenaga kerja yang diinginkan sehingga memperbesar kemungkinan untuk terserap dalam lapangan pekerjaan. Hal ini menggambarkan bahwa mutu sumberdaya manusia berhubungan positif dengan penyerapan tenaga kerja (Sadariawati, 2010).

Perbaikan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dapat mendorong peningkatan produktivitas pekerja yang dapat meningkatkan *output* perusahaan. Peningkatan *output* tentunya akan mempengaruhi permintaan *aggregate* yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mendorong perluasan lapangan pekerjaan yang dimana peningkatan permintaan tenaga kerja meningkat diimbangi dengan perluasan lapangan pekerjaan. Sehingga hubungan mutu SDM dan penyerapan tenaga kerja adalah positif melalui pertumbuhan ekonomi (Asiedu, 2004).

Pertumbuhan ekonomi melalui PDRB yang terus meningkat diharapkan dapat menyerap tenaga kerja. Karena dengan kenaikan pendapatan nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja,

dimana tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang dapat mendorong peningkatan produksi. Sehingga Pertumbuhan ekonomi berhubungan positif terhadap penyerapan tenaga kerja (Todaro, 2013). Berikut merupakan kerangka konseptual penelitian ini.



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

3.2 Hipotesis

1. Diduga bahwa upah berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja:
 - a. Upah berpengaruh langsung secara negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.
 - b. Upah berpengaruh tidak langsung secara negatif terhadap penyerapan tenaga kerja melalui investasi.
 - c. Upah berpengaruh tidak langsung secara positif terhadap penyerapan tenaga kerja melalui mutu SDM.
 - d. Upah berpengaruh tidak langsung secara negatif terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi.
 - e. Upah berpengaruh tidak langsung secara negatif terhadap penyerapan tenaga kerja melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi.
 - f. Upah berpengaruh tidak langsung secara positif terhadap penyerapan tenaga kerja melalui mutu SDM dan pertumbuhan ekonomi.
2. Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja:
 - a. Pengeluaran pemerintah berpengaruh langsung secara positif terhadap penyerapan tenaga kerja.
 - b. Pengeluaran pemerintah berpengaruh tidak langsung secara positif terhadap penyerapan tenaga kerja melalui investasi.
 - c. Pengeluaran pemerintah berpengaruh tidak langsung secara positif terhadap penyerapan tenaga kerja melalui mutu SDM.
 - d. Pengeluaran pemerintah berpengaruh tidak langsung secara positif terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi.

- e. Pengeluaran pemerintah berpengaruh tidak langsung secara positif terhadap penyerapan tenaga kerja melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi.
 - f. Pengeluaran pemerintah berpengaruh tidak langsung secara positif terhadap penyerapan tenaga kerja melalui mutu SDM pertumbuhan ekonomi.
3. Diduga terdapat perbedaan langsung dan tidak langsung *dummy* KBI atau KTI terhadap penyerapan tenaga kerja:
- a. Terdapat perbedaan secara langsung Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) terhadap penyerapan tenaga kerja.
 - b. Terdapat perbedaan secara tidak langsung KBI dan KTI terhadap penyerapan tenaga kerja melalui investasi.
 - c. Terdapat perbedaan secara tidak langsung KBI dan KTI terhadap penyerapan tenaga kerja melalui mutu SDM.
 - d. Terdapat perbedaan secara tidak langsung KBI dan KTI terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi.
 - e. Terdapat perbedaan secara tidak langsung KBI dan KTI terhadap penyerapan tenaga kerja melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi.
 - f. Terdapat perbedaan secara tidak langsung KBI dan KTI terhadap penyerapan tenaga kerja melalui mutu SDM dan pertumbuhan ekonomi.
4. Diduga terdapat perbedaan langsung dan tidak langsung *dummy* upah terhadap penyerapan tenaga kerja:
- a. Terdapat perbedaan secara langsung upah pada Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) terhadap penyerapan tenaga kerja.
 - b. Terdapat perbedaan secara tidak langsung upah pada KBI dan KTI terhadap penyerapan tenaga kerja melalui investasi.

- c. Terdapat perbedaan secara tidak langsung upah pada KBI dan KTI terhadap penyerapan tenaga kerja melalui mutu SDM.
 - d. Terdapat perbedaan secara tidak langsung upah pada KBI dan KTI terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi.
 - e. Terdapat perbedaan secara tidak langsung upah pada KBI dan KTI terhadap penyerapan tenaga kerja melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi.
 - f. Terdapat perbedaan secara tidak langsung upah pada KBI dan KTI terhadap penyerapan tenaga kerja melalui mutu SDM dan pertumbuhan ekonomi.
5. Diduga terdapat perbedaan langsung dan tidak langsung dummy pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja:
- a. Terdapat perbedaan secara langsung pengeluaran pemerintah pada Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) terhadap penyerapan tenaga kerja.
 - b. Terdapat perbedaan secara tidak langsung pengeluaran pemerintah pada KBI dan KTI terhadap penyerapan tenaga kerja melalui investasi.
 - c. Terdapat perbedaan secara tidak langsung pengeluaran pemerintah pada KBI dan KTI terhadap penyerapan tenaga kerja melalui mutu SDM.
 - d. Terdapat perbedaan secara tidak langsung pengeluaran pemerintah pada KBI dan KTI terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi.
 - e. Terdapat perbedaan secara tidak langsung pengeluaran pemerintah pada KBI dan KTI terhadap penyerapan tenaga kerja melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi.
 - f. Terdapat perbedaan secara tidak langsung pengeluaran pemerintah pada KBI dan KTI terhadap penyerapan tenaga kerja melalui mutu SDM dan pertumbuhan ekonomi.